



## Analisis Pengaruh Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah Tahun 2021–2024

*Analysis of Structural Transformation and Economic Growth on Income Inequality in Central Java 2021–2024*

**Salsabila Dyan Pratiwi, Wahyu Putra Darmawan**

Politeknik Keuangan Negara STAN

### Info Artikel

Diterima : 11 November 2026  
Direvisi : 20 April 2026  
Disetujui : 5 Juni 2026

#### **Kata kunci:**

Ketimpangan Pendapatan  
Pertumbuhan Ekonomi  
Sektor Industri  
Sektor Jasa  
Transformasi Struktural

#### **Keywords:**

Economic Growth  
Income Inequality  
Industry Sector  
Services Sector  
Structural Transformation

Corresponding Author :  
Salsabila Dyan Pratiwi  
salsabiladyanpratiwi@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri, sektor jasa, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan data sekunder 15 kabupaten/kota periode 2021-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan *Random Effects Model* (REM) berdasarkan kerangka teori transformasi struktural Chenery dan Syrquin serta Hipotesis Kuznets. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ke sektor industri dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan transformasi ke sektor jasa berpengaruh negatif namun tidak signifikan. PDRB per kapita sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Temuan ini menunjukkan perlunya pemerataan investasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penguatan pembangunan yang lebih inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

### Abstract

*This study aims to analyze the effects of structural transformation from the agricultural sector to the industrial and service sectors, as well as economic growth, on income inequality in Central Java Province. The study employs secondary data from 15 regencies/cities during the 2021-2024 period obtained from Statistics Indonesia (BPS). The data were analyzed using panel data regression with the Random Effects Model (REM) based on the structural transformation framework of Chenery and Syrquin and the Kuznets Hypothesis. The results indicate that structural transformation toward the industrial sector and economic growth have a positive and significant effect on income inequality, while transformation toward the service sector has a negative but insignificant effect. GRDP per capita, as a control variable, has no significant effect on income inequality. These findings suggest the need for more equitable investment distribution, workforce quality improvement, and more inclusive development policies to reduce income inequality.*

## PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan pascapandemi. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah merosot hingga minus 2,65%. Namun, kondisi ini perlahan pulih dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,65% pada 2021 dan 5,31% pada 2022 (BPS, 2022; BPS, 2025). Kontributor perekonomian terbesar pada provinsi tersebut adalah sektor industri pengolahan yang mencapai 33% PDRB, jauh di atas sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (15%) serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (13%) dengan proporsi yang relatif stabil dari 2020 hingga 2024 (BPS, 2026c). Dominasi sektor industri tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Provinsi Jawa Tengah semakin bertumpu pada sektor sekunder. Namun, besarnya kontribusi sektor terhadap PDRB belum tentu diikuti oleh pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat.

Rasio Gini yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan penurunan dari 37,2% (2021) menjadi 36,7% (2024) (BPS, 2026a). Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Penelitian membuktikan bahwa 20% penduduk kelas atas menguasai lebih dari 40% total pengeluaran yang menunjukkan adanya konsentrasi kekayaan yang besar pada kelompok kecil masyarakat (Hubbansyah et al., 2023). Kondisi tersebut didukung oleh penurunan indeks ketimpangan pembangunan antar wilayah, Indeks Williamson, yang hanya menunjukkan penurunan dari 65,64% (2021) menjadi 64,72% (2024) (BPS, 2025).

Kedua indikator tersebut, baik Rasio Gini maupun Indeks Williamson, secara bersama-sama menunjukkan perbaikan yang sangat marginal (kurang dari 1,5% dalam empat tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan ketimpangan, baik pada level individu maupun antarwilayah kabupaten/kota masih relatif stagnan. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa

pertumbuhan sektor industri belum sepenuhnya menciptakan pemerataan. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian mengenai bagaimana transformasi struktural memengaruhi ketimpangan pendapatan pada unit analisis kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pada dasarnya, ketimpangan hampir selalu terjadi dalam pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang (Amalia & Utomo, 2024; Pratiwi, 2021). Ketimpangan dapat terjadi dalam lingkup mikro di tingkat individu dan lingkup makro di tingkat wilayah sebagai akibat dari perbedaan tingkat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ketimpangan antarwilayah menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan nasional, mengingat adanya perbedaan kapasitas fiskal, akses terhadap sumber daya, dan ketersediaan infrastruktur yang dapat memperlebar kesenjangan pembangunan (Frisnoiry et al., 2024).

Dampak nyata dari ketimpangan adalah kesulitan sebagian masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Ketimpangan ekonomi dan pembangunan menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kesempatan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, pendidikan, dan peluang ekonomi cenderung memperoleh manfaat pembangunan yang lebih besar sehingga pendapatannya terus meningkat. Akibatnya, masyarakat kelas atas semakin kaya, sedangkan masyarakat kelas bawah semakin tertinggal (Brajannto et al., 2021).

Ketimpangan terjadi karena minimnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat keterampilan dan pendidikan, kepemilikan aset, kemampuan wilayah dalam menghadapi guncangan ekonomi, serta buruknya keadaan infrastruktur (Nurrohim et al., 2024; Yoertiara & Feriyanto, 2022). Faktor lain yang diduga memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah transformasi struktural, yaitu proses pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa.

Menurut Chenery & Syrquin (1975), pembangunan ekonomi ditandai oleh

perubahan struktur produksi (*structure of production*) yang terjadi seiring meningkatnya tingkat pendapatan. Perubahan tersebut tercermin dari bergesernya komposisi nilai tambah antarsektor selama proses pembangunan sehingga menunjukkan adanya transformasi struktur ekonomi dari waktu ke waktu. Analisis Chenery dan Syrquin menggunakan perubahan pangsa nilai tambah sektor-sektor ekonomi sebagai indikator utama untuk menggambarkan proses transformasi struktural yang menyertai pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan konsep tersebut, transformasi struktural diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perekonomian melalui berkembangnya sektor-sektor modern.

Jabani et al., (2024) dan Romli et al. (2016) menyatakan bahwa transformasi struktural yang tidak diikuti transformasi struktur tenaga kerja dapat meningkatkan disparitas pendapatan. Fenomena tersebut terjadi karena peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi mensyaratkan pendidikan dan keterampilan yang tinggi pula sehingga hanya dapat dinikmati oleh sebagian tenaga kerja. Sementara itu, sebagian tenaga kerja tetap berada pada sektor tradisional yang mengalami surplus tenaga kerja dengan produktivitas relatif rendah. Temuan tersebut dikuatkan oleh Putri & Monika (2022) yang menunjukkan bahwa perubahan struktural yang terjadi di Jawa Barat masih bersifat *unbalanced transformation*. Kondisi tersebut terjadi ketika perubahan struktur produksi tidak diikuti oleh perpindahan tenaga kerja secara seimbang sehingga perubahan struktural berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Transformasi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sektor industri berkontribusi cukup besar, mencapai 40% dari total PDRB selama periode 2017 sampai 2020 (Firmansyah et al., 2024). Kontribusi tersebut terus meningkat hingga menjadi 45% dari total PDRB pada 2024 (BPS, 2026c). Namun, terdapat beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah yang masih mempertahankan sektor pertanian sebagai penghasil utama pendapatan.

Perbedaan struktur ekonomi tersebut tercermin dari hasil klasifikasi Tipologi Klassen berdasarkan PDRB lapangan usaha pertanian pada gambar 1. Sebagian kabupaten/kota masih tergolong sebagai daerah pertanian maju dan tumbuh pesat maupun daerah pertanian potensial. Sementara itu, sebagian lainnya telah bergeser menjadi daerah dengan kontribusi pertanian yang relatif kecil karena perekonomiannya didominasi oleh sektor industri dan sektor nonpertanian lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi struktural di Provinsi Jawa Tengah berlangsung dengan tingkat yang berbeda-beda antarwilayah.

| KUADRAN I                       | KUADRAN II                     |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Pertanian maju dan tumbuh pesat | Pertanian maju tetapi tertekan |
| 1. Kabupaten Purbalingga        | 1. Kabupaten Kebumen           |
| 2. Kabupaten Banjarnegara       | 2. Kabupaten Purworejo         |
| 3. Kabupaten Wonosobo           | 3. Kabupaten Magelang          |
| 4. Kabupaten Boyolali           | 4. Kabupaten Wonogiri          |
| 5. Kabupaten Pati               | 5. Kabupaten Sragen            |
| 6. Kabupaten Temanggung         | 6. Kabupaten Grobogan          |
| 7. Kabupaten Kendal             | 7. Kabupaten Blora             |
| 8. Kabupaten Pemalang           | 8. Kabupaten Rembang           |
| 9. Kabupaten Brebes             | 9. Kabupaten Demak             |
|                                 | 10. Kabupaten Batang           |
|                                 | 11. Kabupaten Pekalongan       |

  

| KUADRAN III                | KUADRAN IV                   |
|----------------------------|------------------------------|
| Pertanian Berkembang Cepat | Pertanian Relatif Tertinggal |
| 1. Kabupaten Banyumas      | 1. Kabupaten Cilacap         |
| 2. Kabupaten Klaten        | 2. Kabupaten Tegal           |
| 3. Kabupaten Sukoharjo     | 3. Kota Magelang             |
| 4. Kabupaten Karanganyar   | 4. Kota Pekalongan           |
| 5. Kabupaten Kudus         |                              |
| 6. Kabupaten Jepara        |                              |
| 7. Kabupaten Semarang      |                              |
| 8. Kota Surakarta          |                              |
| 9. Kota Salatiga           |                              |
| 10. Kota Semarang          |                              |
| 11. Kota Tegal             |                              |

**Gambar 1** Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tipologi Klassen Sektor Pertanian 2011-2021  
Sumber : (BPS, 2022)

Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktur penyerapan tenaga kerja. Tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja di sektor pertanian masih berada pada kisaran 24%, sedangkan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan terus menurun selama periode 2021 – 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan nilai tambah sektor industri belum diikuti oleh perpindahan tenaga kerja ke sektor

industri secara sepadan sehingga manfaat transformasi struktural berpotensi belum dinikmati secara merata.

**Tabel 1** Penduduk yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) 2021-2023

| Tahun | Pertanian (%) | Industri Pengolahan (%) |
|-------|---------------|-------------------------|
| 2021  | 23,74%        | 22,17%                  |
| 2022  | 24,78%        | 21,89%                  |
| 2023  | 24,43%        | 20,94%                  |

Sumber : (BPS, 2026b)

Teori ketimpangan *Kuznets* memberikan pemahaman bahwa dalam tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan justru cenderung meningkat seiring dengan transformasi ekonomi yang berlangsung. Ketimpangan ini baru akan menurun ketika sektor modern mulai menyerap lebih banyak tenaga kerja dan distribusi pendapatan menjadi lebih merata (Hermawan & Taher, 2025). Dalam konteks ini, ketimpangan yang terjadi akibat dominasi sektor industri dan jasa yang tidak diiringi dengan pemerataan akses kerja merupakan cerminan dari tahap awal transformasi struktural yang belum mencapai titik balik dalam kurva *Kuznets*. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Oktarina & Yuliana (2023) di Sumatera Barat yang menunjukkan bahwa hipotesis *Kuznets* terbukti berlaku, di mana peningkatan pendapatan per kapita pada tahap awal justru disertai dengan peningkatan ketimpangan, sebagaimana tercermin dari nilai Rasio Gini yang cukup tinggi.

Penelitian mengenai pengaruh transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan masih menunjukkan hasil yang inkonsisten, khususnya pada transformasi menuju sektor industri. Romli et al. (2016) menemukan bahwa peningkatan pangsa sektor industri meningkatkan disparitas pendapatan. Sebaliknya, Putri & Monika (2022) serta Jabani et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi menuju sektor industri justru berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Namun, ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil yang relatif konsisten pada transformasi menuju sektor jasa yang cenderung meningkatkan

ketimpangan pendapatan. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada karakteristik wilayah yang berbeda.

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji keterkaitan antara transformasi struktural dan ketimpangan pendapatan, masih terdapat beberapa celah yang dapat diidentifikasi. Pertama, cakupan wilayah hanya berfokus pada daerah tertentu seperti Jawa Barat, Madura, dan Sulawesi Tenggara (Jabani et al., 2024; Putri & Monika, 2022; Romli et al., 2016). Kedua, sebagian besar studi masih menggunakan rentang data prapandemi COVID-19. Hingga kini belum ada penelitian yang meneliti rentang waktu terbaru, yakni tahun 2021 – 2024 untuk menangkap dampak pemulihan ekonomi pascapandemi. Ketiga, berbeda dengan Jabani et al. (2024) yang berfokus pada wilayah yang telah mengalami transformasi struktural, penelitian ini menganalisis pengaruh transformasi struktural pada kabupaten/kota dengan aktivitas ekonomi terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan Chenery & Syrquin (1975) yang menyatakan bahwa proses pembangunan ekonomi ditandai oleh perubahan struktur produksi yang menyertai peningkatan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, kabupaten/kota dengan PDRB yang relatif tinggi dipandang sebagai wilayah yang berpotensi menunjukkan dinamika transformasi struktural yang lebih nyata.

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transformasi struktural sektor pertanian ke sektor industri, transformasi sektor pertanian ke sektor jasa, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, dengan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Dengan fokus wilayah yang lebih spesifik dan rentang waktu terbaru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika ketimpangan pendapatan di daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode dan Variabel**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel untuk menganalisis pengaruh transformasi struktural terhadap ketimpangan pendapatan. Pemilihan variabel didasarkan pada kerangka teori transformasi struktural Chenery & Syrquin (1975) serta Hipotesis Kuznets yang menjelaskan hubungan antara perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri, transformasi dari sektor pertanian ke sektor jasa, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol.

Operasionalisasi variabel transformasi struktural mengacu pada Dastidar (2012) yang mengukur transformasi melalui perubahan pangsa output antarsektor ekonomi dalam pembentukan PDRB. Pendekatan tersebut merepresentasikan dua arah transformasi utama, yaitu pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri dan dari sektor pertanian menuju sektor jasa. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan rasio sektor industri terhadap sektor pertanian dan rasio sektor jasa terhadap sektor pertanian sebagai indikator transformasi struktural.

Sejalan dengan model Dastidar (2012), penelitian ini tidak memasukkan variabel makroekonomi dan sosial lainnya, seperti tingkat kemiskinan, investasi, maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga kesesuaian model dengan kerangka teori transformasi struktural sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih konseptual maupun statistis antarvariabel. Sebagai contoh, variabel kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan distribusi pengeluaran yang juga menjadi dasar pengukuran Rasio Gini sehingga berpotensi menimbulkan masalah endogenitas apabila dimasukkan secara bersamaan dalam model.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transformasi sektor pertanian ke

sektor industri, transformasi sektor pertanian ke sektor jasa, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif regresi data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen terdiri atas transformasi sektor pertanian ke sektor industri, transformasi sektor pertanian ke sektor jasa, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, variabel dependen yakni Rasio Gini. Dalam penelitian ini digunakan data PDRB kabupaten/kota sebagai variabel kontrol.

Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, yakni tabel interaktif dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data pada penelitian ini diambil dari produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha dengan harga konstan 2010 untuk menghilangkan pengaruh harga. Lapangan usaha sebagai rincian data PDRB dijabarkan dalam 17 sektor. Tujuh belas sektor tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga sektor sesuai pengelompokan *Chenery-Syrquin*, yakni sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa (Romli et al., 2016).

### **Populasi dan Sampel**

Studi ini berfokus pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai populasi penelitian. Sementara itu, sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2023). Kriteria *purposive sampling* adalah 15 kabupaten/kota dengan kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tertinggi terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Sampel dipilih karena merupakan penggerak utama perekonomian daerah sehingga dinamika ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut lebih representatif dalam menggambarkan kondisi ketimpangan di tingkat provinsi. Berdasarkan pemilihan sampel, terdapat total 15 kabupaten/kota terpilih, yaitu : Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar,

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Boyolali. Periode penelitian dimulai dari tahun 2021 hingga 2024 sehingga menghasilkan 60 observasi data panel dengan unit analisis *regency-year*.

Analisis data dilakukan dengan aplikasi STATA 19 melalui statistik deskriptif, uji model, dan analisis regresi data panel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda dengan uji simultan, uji parsial, dan uji koefisien determinasi. Untuk menemukan model terbaik, dilakukan uji *Lagrange Multiplier* (LM), uji *Hausman*, dan uji *Chow*.

**Tabel 2** Variabel dan Pengukuran

| Jenis Variabel      | Variabel                                                         | Indikator                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Variabel Dependen   | Ketimpangan                                                      | Rasio Gini                                      |
| Variabel Independen | Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri | Rasio sektor industri terhadap sektor pertanian |
|                     | Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa     | Rasio sektor jasa terhadap sektor pertanian     |
|                     | Pertumbuhan ekonomi                                              | Persentase pertumbuhan ekonomi                  |
| Variabel Kontrol    | Pendapatan per kapita                                            | PDRB per kapita                                 |

### Model Regresi Data Panel

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Indi}_{it} + \beta_2 \text{Jas}_{it} + \beta_3 \text{PE}_{it} + \beta_4 \text{Perkapita}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- $Y_{it}$  : Ketimpangan (Rasio Gini) di kabupaten/kota  $i$  pada tahun  $t$
- $\text{Indi}_{it}$  : Rasio sektor industri terhadap sektor pertanian
- $\text{Jas}_{it}$  : Rasio sektor jasa terhadap sektor pertanian
- $\text{PE}_{it}$  : Pertumbuhan ekonomi (%)
- $\text{Perkapita}_{it}$  : PDRB per kapita
- $\varepsilon_{it}$  : Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

**Tabel 3** Statistik Deskriptif

| Variabel                                                         | Mean     | Std.Dev  | Min.     | Max.    |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| Ketimpangan                                                      | 0.365    | 0.032    | 0.303    | 0.438   |
| Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri | 15.122   | 24.172   | 0.668    | 83.073  |
| Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa     | 18.967   | 44.356   | 1.286    | 195.332 |
| Pertumbuhan Ekonomi                                              | 0.046    | 0.013    | - 0.0154 | 0.0633  |
| Pendapatan Per Kapita                                            | 59896.02 | 36888.56 | 23141    | 156570  |

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel ketimpangan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,365 dengan standar deviasi 0,032. Hal ini menunjukkan variasi ketimpangan yang relatif rendah antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Variabel transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri memiliki rata-rata 15,122 dengan sebaran yang cukup besar. Sementara itu, transformasi ke sektor jasa memiliki rata-rata lebih tinggi dan standar deviasi yang lebih besar pula sehingga menandakan ketimpangan distribusi transformasi yang cukup lebar antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata 0,046 atau sekitar 4,6% per tahun. Adanya nilai minimum -0,0154 yang menunjukkan bahwa terdapat wilayah dengan pertumbuhan negatif. Sementara itu, pendapatan per kapita menunjukkan variasi dan standar deviasi yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi antarkabupaten/kota di wilayah yang diamati.

**Tabel 4** Panel Test

| Tests   | Chow Test          | Breusch-Pagan Test  | Hausman Test        |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|
| P-Value | 0.0012             | 0.0007              | 0.8393              |
| Results | Fixed Effect Model | Random Effect Model | Random Effect Model |

Dalam penelitian ini digunakan model regresi data panel dengan pendekatan *Random Effects Model* (REM). Pemilihan model tersebut didasarkan pada hasil Uji *Chow*, Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dan Uji *Hausman* yang menunjukkan bahwa model *Random Effects* paling sesuai dibandingkan *Common Effects* maupun *Fixed Effects*. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4, seluruh uji statistik mendukung pemilihan model *Random Effects* sebagai model yang paling tepat untuk penelitian ini. Uji *Chow* menunjukkan bahwa *fixed effect* lebih baik dibanding *common effect* (p-value  $0,0012 < 5\%$ ), sedangkan uji *Breusch-Pagan* menunjukkan bahwa *random effect* lebih tepat dibanding *common effect* (p-value  $0,0007 < 5\%$ ). Hal ini juga diperkuat oleh hasil uji *Hausman* yang menunjukkan bahwa model *random effect* lebih sesuai dibandingkan *fixed effect* (p-value  $0,8393 > 5\%$ ).

#### Uji Parameter

##### Uji Signifikansi Simultan F

|                            | <i>Prob(F-statistic)</i> |
|----------------------------|--------------------------|
| <i>Random Effect Model</i> | 0.0025                   |

Tabel 5 Uji Simultan

Berdasarkan tabel uji signifikansi simultan di atas, hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 0.0025 dengan nilai signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen dan kontrol secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi

|                            | <i>Adjusted R-squared</i> |
|----------------------------|---------------------------|
| <i>Random Effect Model</i> | 0.3614                    |

Berdasarkan tabel uji koefisien determinasi  $R^2$  di atas, diperoleh nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0.3614. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol mampu menjelaskan 36.14% variasi pada variabel dependen. Sementara itu, sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

#### Uji Signifikansi Parsial t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji dianggap signifikan secara statistik jika nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh kurang dari  $\alpha = 0,05$ . Selain itu, uji parsial ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel, apakah memiliki korelasi positif atau negatif. Ringkasan hasil uji parsial yang menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen berupa FDI disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Uji Parsial

| Variabel    | Koefisien | Probabilitas |
|-------------|-----------|--------------|
| Indiit      | .0018651  | 0.041        |
| Jasait      | -.0005029 | 0.134        |
| PEit        | .6552139  | 0.013        |
| Perkapitait | -3.34e-07 | 0.305        |
| _cons       | 0.3247579 | 0.000        |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_{it} = 0,3247579 + 0,0018651 \text{ Indiit} - 0,0005029 \text{ Jasait} + 0,6552139 \text{ PEit} - 0,000000334 \text{ Perkapitait} + \varepsilon_{it}$$

#### Keterangan:

- $Y_{it}$  : Ketimpangan (rasio gini) di kabupaten/kota i pada tahun t
- Indiit : Rasio sektor industri terhadap sektor pertanian
- Jasait : Rasio sektor jasa terhadap sektor pertanian
- PEit : Pertumbuhan ekonomi (%)
- Perkapitait : PDRB per kapita
- $\varepsilon_{it}$  : Error term

#### Pembahasan

##### Pengaruh transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri terhadap Ketimpangan

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti semakin tinggi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke industri, maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sektor industri belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian secara merata sehingga hanya kelompok tertentu yang mendapatkan manfaat dari transformasi ini.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui karakteristik sektor industri yang bersifat *capital-intensive* sehingga peningkatan output industri tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Investasi berupa teknologi dan mesin produksi menyebabkan keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati pemilik modal dan tenaga kerja terampil. Namun, bagi tenaga kerja yang keterampilannya rendah seperti tenaga kerja eks-pertanian akan sulit terserap ke dalam industri modern (Fakrudin & Jamal, 2021). Hal ini membentuk kesenjangan produktivitas antar sektor, di mana sektor industri tumbuh dengan produktivitas tinggi sementara sektor pertanian mengalami sebaliknya. Ketimpangan produktivitas tersebut pada akhirnya berimplikasi langsung pada kesenjangan pendapatan karena manfaat pertumbuhan sektor modern (industri) belum tersalurkan secara merata ke sektor tradisional (pertanian) (Rinaldi et al., 2022).

Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Romli et al. (2016) yang menyatakan bahwa transformasi ke sektor industri tanpa didukung oleh transformasi tenaga kerja akan memperbesar kesenjangan pendapatan. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan studi oleh Amalia & Utomo (2024) yang menyatakan bahwa rasio PDRB sektor industri berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Temuan ini relevan dalam konteks Jawa Tengah di mana struktur ekonomi bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri, tetapi belum diikuti dengan distribusi manfaat ekonomi yang merata antarwilayah. Meskipun sektor industri menjadi kontributor besar terhadap PDRB provinsi, transformasi tersebut masih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu seperti Kota Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Kendal yang memiliki basis industri yang cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya aglomerasi

industri di Kota Semarang yang didukung akses langsung oleh Pelabuhan Tanjung Emas serta infrastruktur logistik yang lebih maju (Muaziz et al., 2022). Selain itu, terdapat industri rokok kretek yang ditopang dengan kekuatan basis industri di Kabupaten Kudus yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Setiyadi & Santosa, 2013). Selanjutnya, penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Kendal mengarahkan investasi domestik dan asing secara terpusat melalui insentif fiskal dan kemudahan perizinan (Sarfiah et al., 2023). Sementara itu, wilayah lain seperti Kabupaten Pati, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas masih mengandalkan sektor pertanian dan belum sepenuhnya terserap ke dalam proses industrialisasi. Ketimpangan ini menyebabkan daerah industri mengalami percepatan pertumbuhan dan peningkatan pendapatan, sedangkan daerah agraris cenderung tertinggal baik dari sisi produktivitas maupun kesejahteraan masyarakatnya.

Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi struktural yang terjadi di Jawa Tengah bersifat tidak inklusif dan cenderung menciptakan ketimpangan baru antarwilayah. Temuan ini sejalan dengan Hipotesis *Kuznets* yang menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat akibat konsentrasi pertumbuhan di sektor modern. Dalam hal ini, kabupaten/kota dengan sektor industri yang dominan mengalami percepatan pendapatan yang tidak sebanding dengan wilayah lain yang masih berbasis pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini selaras dengan teori transformasi struktural Chenery & Syrquin (1975) yang menyatakan bahwa industrialisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan ekonomi karena mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi melalui perpindahan aktivitas dari sektor pertanian ke sektor industri. Namun, pada tahap awal transformasi tersebut, manfaat pembangunan cenderung terkonsentrasi pada

wilayah yang memiliki basis industri, infrastruktur yang memadai, serta tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai. Sebaliknya, wilayah yang masih bergantung pada sektor pertanian memperoleh manfaat yang relatif lebih kecil sehingga kesenjangan pendapatan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat meningkat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi menuju sektor industri di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesempatan kerja dan distribusi produktivitas, sehingga peningkatan kontribusi sektor industri justru diikuti oleh meningkatnya ketimpangan pendapatan.

### **Pengaruh transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa terhadap Ketimpangan**

Berbeda dengan transformasi ke sektor industri, transformasi ke sektor jasa menunjukkan koefisien negatif, tetapi tidak signifikan secara statistik. Arah negatif ini mengindikasikan bahwa transformasi ke sektor jasa berpotensi menurunkan ketimpangan, meskipun pengaruhnya belum cukup kuat untuk disimpulkan secara meyakinkan. Hasil ini selaras dengan temuan oleh Amalia & Utomo (2024) yang menyatakan bahwa rasio PDRB sektor jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Namun bertentangan dengan temuan Putri & Monika (2022) yang menyatakan bahwa sektor jasa di Jawa Barat justru menjadi penyumbang ketimpangan karena akses terhadap sektor ini cenderung terbatas pada wilayah atau kelompok tertentu. Penelitian lain oleh Khafidzin & Istifadah (2020) juga menyatakan bahwa sektor jasa berpengaruh positif signifikan dalam meningkatkan kemiskinan di Jawa Timur.

Dalam konteks Jawa Tengah, sektor jasa memang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir di beberapa daerah utama seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta, serta wilayah penyangga seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten. Daerah daerah tersebut sedang mengalami ekspansi pada sektor perdagangan, transportasi, dan

jasa keuangan. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB provinsi masih berada di bawah sektor industri dan penyebarannya lebih merata. Selain itu, sektor jasa di Jawa Tengah lebih didominasi oleh aktivitas jasa tradisional dan informal, seperti perdagangan eceran, jasa makanan-minuman, dan jasa perseorangan, yang relatif lebih inklusif dan menyerap tenaga kerja dari kelompok berpendidikan rendah atau menengah. Hal ini memungkinkan distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas dan menjelaskan mengapa pengaruhnya terhadap ketimpangan tidak signifikan secara statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor jasa berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi sektor jasa belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan ketimpangan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Menurut Hipotesis Kuznets, pada tahap awal pembangunan ekonomi, transformasi struktural umumnya diikuti oleh meningkatnya ketimpangan akibat adanya perbedaan produktivitas dan pendapatan antara sektor tradisional dan sektor modern. Namun, ketika pembangunan memasuki tahap yang lebih matang, sektor modern, termasuk sektor jasa, mulai menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Oleh karena itu, arah koefisien yang negatif dalam penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa transformasi menuju sektor jasa mulai bergerak ke fase penurunan ketimpangan sebagaimana dijelaskan dalam kurva Kuznets, meskipun proses tersebut belum berlangsung secara optimal sehingga pengaruhnya belum signifikan secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan sektor jasa di Provinsi Jawa Tengah masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu atau didominasi oleh subsektor jasa yang memerlukan keterampilan dan modal relatif tinggi, sehingga manfaat transformasi ekonomi belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Temuan tersebut juga sejalan dengan teori transformasi struktural Chenery &

Syrquin (1975) yang menjelaskan bahwa peningkatan peran sektor jasa merupakan karakteristik negara yang memasuki tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju. Namun, keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh perubahan kontribusi output antar sektor, tetapi juga oleh kemampuan sektor jasa dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas secara luas. Apabila ekspansi sektor jasa lebih banyak terjadi pada subsektor modern yang bersifat padat modal dan membutuhkan tenaga kerja berkeahlian tinggi, maka manfaat pembangunan cenderung hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Akibatnya, meskipun arah hubungan antara transformasi menuju sektor jasa dan ketimpangan bersifat negatif, pengaruhnya belum cukup kuat untuk menghasilkan penurunan ketimpangan yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi struktural di Provinsi Jawa Tengah masih berada pada tahap transisi, di mana perubahan struktur ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara inklusif.

### **Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan**

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini mendukung Hipotesis *Kuznets* yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun pada tahap pembangunan yang lebih lanjut. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah kemungkinan masih terpusat di daerah-daerah tertentu, seperti kota besar atau kawasan industri, sehingga kelompok masyarakat di wilayah tertinggal belum merasakan manfaat yang setara. Penelitian ini sejalan dengan temuan Oktarina & Yuliana (2023) di Sumatera Barat yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan tidak selalu disertai dengan pemerataan pendapatan. Penelitian ini juga selaras dengan studi oleh (Purba et al., 2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah saat ini masih berada pada fase awal dari kurva *Kuznets*, di mana pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan. Daerah-daerah dengan pertumbuhan tinggi seperti Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Kendal cenderung menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar karena memiliki basis industri dan jasa yang lebih mapan. Sebaliknya, wilayah seperti Kabupaten Brebes, Pati, dan Cilacap yang masih bergantung pada sektor primer, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dan kontribusi yang lebih kecil terhadap PDRB provinsi. Ketimpangan ini menjadi bukti bahwa hasil dari pertumbuhan belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat di wilayah tertinggal. Di sisi lain, variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat, hal tersebut belum cukup untuk menjamin penurunan ketimpangan apabila tidak disertai dengan kebijakan redistribusi atau perluasan akses terhadap sektor produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini sejalan dengan teori transformasi struktural (Chenery & Syrquin, 1975) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari proses pembangunan yang ditandai dengan perubahan struktur produksi, peningkatan produktivitas, dan pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Namun, pada tahap awal transformasi tersebut, manfaat pertumbuhan ekonomi umumnya belum terdistribusi secara merata karena peningkatan produktivitas dan investasi masih terkonsentrasi pada sektor dan wilayah tertentu. Akibatnya, kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan tenaga kerja terampil memperoleh peningkatan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya,

sehingga ketimpangan cenderung meningkat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Chenery dan Syrquin bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan pendapatan apabila proses transformasi struktural belum berlangsung secara inklusif.

### **Implikasi terhadap Kebijakan Pembangunan Wilayah**

Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan wilayah di Jawa Tengah perlu diarahkan pada pemerataan investasi industri, bukan sekadar mempercepat pertumbuhan di kawasan yang sudah maju seperti Semarang, Kendal, dan Kudus. Jika investasi terus terkonsentrasi di kawasan tersebut, ketimpangan pendapatan antarwilayah berpotensi melebar meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi tetap positif. Pemerintah daerah perlu memberikan insentif yang lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modal di kabupaten berbasis agraris seperti Pati, Brebes, dan Cilacap sehingga industrialisasi tidak hanya berpusat pada beberapa titik pertumbuhan. Percepatan pembangunan infrastruktur di luar kawasan inti, terutama akses jalan dan konektivitas logistik, menjadi prasyarat agar wilayah tersebut memiliki daya tarik investasi yang setara. Pemerataan investasi dan infrastruktur menjadi kunci agar manfaat transformasi struktural dirasakan lebih merata, tidak hanya oleh wilayah yang sejak awal sudah unggul.

Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal menjadi implikasi kebijakan yang tidak kalah penting. Ketimpangan akibat transformasi struktural sebagian besar bersumber dari ketidakterampilan tenaga kerja eks-pertanian untuk berpindah ke sektor industri modern, sehingga perluasan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri di masing-masing wilayah menjadi mendesak. Penguatan keterkaitan antara sektor industri dan pertanian melalui pengembangan agroindustri juga diperlukan, agar nilai tambah industrialisasi tidak hanya dinikmati pelaku industri besar tetapi juga petani dan pelaku usaha kecil di wilayah agraris. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat di

daerah berbasis pertanian tetap memperoleh manfaat ekonomi dari transformasi struktural tanpa harus sepenuhnya meninggalkan sektor pertanian. Kombinasi peningkatan kapasitas tenaga kerja dan penguatan keterkaitan antarsektor berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih inklusif dan merata antarwilayah.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Artinya, semakin tinggi pergeseran dari sektor pertanian ke industri, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan antar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri belum sepenuhnya inklusif karena terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu seperti Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Kudus. Sebaliknya, transformasi ke sektor jasa menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan, yang mengindikasikan bahwa sektor jasa memiliki potensi untuk menurunkan ketimpangan, tetapi belum cukup kuat secara statistik.

Pertumbuhan ekonomi juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, mendukung Hipotesis *Kuznets* bahwa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan dapat memperbesar kesenjangan pendapatan. Selain itu, variabel PDRB per kapita sebagai kontrol tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap

ketimpangan yang menandakan bahwa peningkatan rata-rata pendapatan belum mampu mendorong pemerataan.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah masih dipengaruhi oleh transformasi ekonomi yang tidak merata dan pertumbuhan yang belum inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan sektor industri dan jasa, tetapi juga memperhatikan pemerataan akses kerja, peningkatan kualitas

tenaga kerja, serta distribusi investasi antarwilayah untuk mengurangi ketimpangan secara berkelanjutan.

## SARAN

Terakhir, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan yang lebih operasional. Pertama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mendorong pengembangan kawasan industri baru di wilayah selatan, seperti Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri, guna mengimbangi konsentrasi industri yang selama ini terpusat di wilayah utara seperti Semarang, Kendal, dan Kudus. Kedua, penguatan hilirisasi sektor pertanian perlu diprioritaskan melalui pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah, sehingga nilai tambah hasil pertanian tidak hanya dinikmati oleh sektor industri besar di kawasan tertentu. Ketiga, peningkatan keterampilan tenaga kerja perlu dilakukan melalui perluasan program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masing-masing kabupaten/kota, khususnya bagi tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian. Keempat, pemerintah daerah perlu memberikan insentif investasi yang lebih kompetitif, seperti kemudahan perizinan dan keringanan pajak daerah, khusus bagi kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan tinggi namun basis industrinya masih lemah. Kelima, pengembangan sektor jasa modern berbasis digital, seperti UMKM digital dan ekonomi kreatif, perlu didorong di wilayah non-industri sebagai jalur alternatif penciptaan lapangan kerja yang tidak bergantung pada keberadaan kawasan industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. M., & Utomo, Y. P. (2024). Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 616–628. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.249>

87

- BPS. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Pertanian Provinsi Jawa Tengah 2011-2021. [https://web-api.bps.go.id/download.php?f=g6y+CpPtRuG3uQ6TTDlLenY2VEIyUVpIa0VFUWpJcVN5aDhpRmxCWU53SU9idmkzUEVSamJOQzNlYmR0dHkyMGI4eUlmbFJUK1RyMlJ1ejRPVUFmM2ozTHFjQmhPN05qSWVxRVFYND2dBRWJucWlxaGVNR1VhWDcrdEg5MlJsRUIvd1VaVzJkaTlKS0JpUzhobVgxU2lJYjIUNXlMNHc5b2pbEpJYjVVclhVVi9RNjRvSXdzSm9kZVB1WGFFbUpXTlZGQINEYjFnMlFXT3VQUUJTVEUvUWY0eGN5ckhKZHIyYldBZHBSaCtwS2xqYzBidGtsakZyQ2hHZHVLVFBY1d3MHPzZnZIV20wTndVMHlqMm9YZEXcGF0MGxicijZqcjBLdHdLa3g5SzUvYTVHenMrTzBBbTBCTENoeTkwc2lISkNNSm80b1YrbkJUCWRq&\\_gl=1\\*shuda0\\*\\_ga\\*MTY0ODc4NTczMS4xNzg5NDk1NTU1\\*\\_ga\\_XXTTVXWHDB\\*cze3ODM1ODMwNDEkbzgzZzEkdDE3ODM1ODMzMzODMkajM2JGwwJGgw](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=g6y+CpPtRuG3uQ6TTDlLenY2VEIyUVpIa0VFUWpJcVN5aDhpRmxCWU53SU9idmkzUEVSamJOQzNlYmR0dHkyMGI4eUlmbFJUK1RyMlJ1ejRPVUFmM2ozTHFjQmhPN05qSWVxRVFYND2dBRWJucWlxaGVNR1VhWDcrdEg5MlJsRUIvd1VaVzJkaTlKS0JpUzhobVgxU2lJYjIUNXlMNHc5b2pbEpJYjVVclhVVi9RNjRvSXdzSm9kZVB1WGFFbUpXTlZGQINEYjFnMlFXT3VQUUJTVEUvUWY0eGN5ckhKZHIyYldBZHBSaCtwS2xqYzBidGtsakZyQ2hHZHVLVFBY1d3MHPzZnZIV20wTndVMHlqMm9YZEXcGF0MGxicijZqcjBLdHdLa3g5SzUvYTVHenMrTzBBbTBCTENoeTkwc2lISkNNSm80b1YrbkJUCWRq&_gl=1*shuda0*_ga*MTY0ODc4NTczMS4xNzg5NDk1NTU1*_ga_XXTTVXWHDB*cze3ODM1ODMwNDEkbzgzZzEkdDE3ODM1ODMzMzODMkajM2JGwwJGgw)
- BPS. (2025). Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah 2020-2024. [https://web-api.bps.go.id/download.php?f=jvad8/a7/u7ggfitYQIQ+FFGYy95aFNUbzR2dEhUWW16b0JxeEU5Sy9NZ3hieWx0c0pTUmY3SzFhNW1Gd2pqa0pHYVo3MlRxBMUVvMlVZWU9GYnJmWlBHTUMyMGVsRlBmUTQ1TVVpNyT6SEpESXlmSW13b0YvUzlZd253dFhBT3lqTHZRNGtHbWZiaXRYTUdwRlBxNVJ5VkJmR2UwNk15ZzltUUpuNFRVYXNZSmhKZWZxNHpINkpyZXRLdDNyK095UGsrekZFMXFvQmk0dWdhN2JLU2lPcXdSKy9FTjJEUDNlODAzRnFBNDR5WTZlUGdBNDgyTUxwSXVaWmp3RERmcDdaaWlFbGtyakFicVV5dUsyVWZrampDZ0dVMEhtckU4bjVtQTZuWVJsL1p0cjBES0JYY2FPa2FGbnJnPQ==&\\_gl=1\\*2qfo3t\\*\\_ga\\*MTY0ODc4NTczMS4xNzg5NDk1NTU1\\*\\_ga\\_XXTTVXWHDB\\*cze3ODM2NzEzODYkbzEzJGcxJHqxNzgzNjcyOTQ4JGozMSRsMCRoMA](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=jvad8/a7/u7ggfitYQIQ+FFGYy95aFNUbzR2dEhUWW16b0JxeEU5Sy9NZ3hieWx0c0pTUmY3SzFhNW1Gd2pqa0pHYVo3MlRxBMUVvMlVZWU9GYnJmWlBHTUMyMGVsRlBmUTQ1TVVpNyT6SEpESXlmSW13b0YvUzlZd253dFhBT3lqTHZRNGtHbWZiaXRYTUdwRlBxNVJ5VkJmR2UwNk15ZzltUUpuNFRVYXNZSmhKZWZxNHpINkpyZXRLdDNyK095UGsrekZFMXFvQmk0dWdhN2JLU2lPcXdSKy9FTjJEUDNlODAzRnFBNDR5WTZlUGdBNDgyTUxwSXVaWmp3RERmcDdaaWlFbGtyakFicVV5dUsyVWZrampDZ0dVMEhtckU4bjVtQTZuWVJsL1p0cjBES0JYY2FPa2FGbnJnPQ==&_gl=1*2qfo3t*_ga*MTY0ODc4NTczMS4xNzg5NDk1NTU1*_ga_XXTTVXWHDB*cze3ODM2NzEzODYkbzEzJGcxJHqxNzgzNjcyOTQ4JGozMSRsMCRoMA)
- BPS. (2026a). Gini Ratio [Dataset].

- <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTgJMG==/gini-rasio.html>
- BPS. (2026b). Penduduk yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) 2021-2023 [Dataset].  
<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM2NSMy/jumlah-penduduk-yang-bekerja-menurut-sektor-ekonomi-di-provinsi-jawa-tengah--jiwa-.html>
- BPS. (2026c). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2021-2025.  
<https://jateng.bps.go.id/id/publication/2026/04/06/e34aca232468f6e801b2e2f6/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-jawa-tengah-menurut-lapangan-usaha-2021-2025.html>
- Brajannoto, D., Amelia, S., Safitri, S., & Pratama, R. R. A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Kemiskinan. 2(1).
- Chenery, H., & Syrquin, M. (1975). *Pattemn of Development 1950-1970*. OXFORD UNIVERSITY PRESS.  
<https://ocw.ui.ac.id/mod/url/view.php?id=853>
- Dastidar, A. G. (2012). *Income Distribution and Structural Transformation: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries*. 25(1).
- Fakrudin, F., & Jamal, A. (2021). Analisis Sektor Industri Pengolaha Ditinjau Dari Penyerapan Tenaga Kerja: Di Kabupaten Bogor. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 13(1), 46–66.  
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2545>
- Firmansyah, M., Sahri, S., Irwan, M., & Maryam, St. (2024). Perubahan Struktur Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 12–19.  
<https://doi.org/10.29303/e-jep.v6i022>
- Frisnoiry, S., Putri, I. E., & Sari, N. I. (2024). Analisis Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Pada Tahun 2023.
- Hermawan, A. U., & Taher, A. R. Y. (2025). Analisis Relevansi Hipotesis Kuznet Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia *PERIODE 2004-2023*. 3(3).
- Hubbansyah, A. K., Dedi Budiman Hakim, Sri Hartoyo, & Widyastutik. (2023). Analisis Empiris Atas Teori Dualistik Ekonomi Lewis: Studi Kasus Indonesia: IPB University, International Center for Applied Finance and Economics (Inter CAFE). *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*, 12(1), 1–22.  
<https://doi.org/10.29244/jekp.12.1.2023.1-22>
- Jabani, B. A., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2024). Pengaruh Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Tenggara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 8(3), 213–225.  
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2024.8.3.213-225>
- Khafidzin, A., & Istifadah, N. (2020). Transformasi Struktural di Jawa Timur: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektoral terhadap Kemiskinan. *Media Trend*, 15(2), 275–282.  
<https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.6789>
- Muaziz, M. H., Haryono, A. T., & Jaelani, A. K. (2022). *Analysis of Urban Agglomeration in Economic and Legal Perspectives (A Study on the Development of Industrial Agglomeration Areas in Semarang City)*. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 20(1).  
<https://doi.org/10.31941/pj.v20i1.1714>
- Nurrohim, M. D., Aghil, M. S., Alazhari, M. A., Fahrezi, M. H., & Fadilla, A. (2024). Analisis Dinamika Ketimpangan Ekonomi terhadap Era Globalisasi di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1–7.  
<https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.225>
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan

- Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat: Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.38035/jgia.v1i1.8>
- Pratiwi, M. C. Y. (2021). Analisis Ketimpangan Antarwilayah dan Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 131–154. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.779>
- Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2022. (2022). BPS. [https://web-api.bps.go.id/download.php?f=y6+VJsVVgHbwylqEO8VjD2JlcmhMYjNoQkx6Z2x4TGY0SHBwdzNrenFTdjZT1Bod3JVazFLbjFTQ1I1L2wyRHNPNG9BU2wzNVVwdEJHdzBoZXpIZ0xnUGZnY3pSNGRrZVVKMzBpNytJVUdURXc3TkZZK2dKYnRVQ0NEcmtsM0l6U3BiangvYTloWjhwOFpNN25uMFpWSk91UXNZd1dlb0NpNHNjVHR1eVQ0bURwa3o1VkhXREtDVm1ZODljY1BXdhPscUJKYkJRb1hLT2tXMnhhdDBYmJNUmhXaGlJa0FjbIRHVVRGTedTMzVxa1JqeUtxYjkwZzB1RnBlK3g3enArMV FmUmMraTBHMEZpU28=&\\_gl=1\\*abhf0\\*\\_ga\\*MTY0ODc4NTczMS4xNzgxNDk1NTU1\\*\\_ga\\_XXTTVXWHDB\\*cze3ODM2NzEzODYkbzEzJGcxJHQxNzgzNjcxNTU2JGozMSRsMCRoMA..](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=y6+VJsVVgHbwylqEO8VjD2JlcmhMYjNoQkx6Z2x4TGY0SHBwdzNrenFTdjZT1Bod3JVazFLbjFTQ1I1L2wyRHNPNG9BU2wzNVVwdEJHdzBoZXpIZ0xnUGZnY3pSNGRrZVVKMzBpNytJVUdURXc3TkZZK2dKYnRVQ0NEcmtsM0l6U3BiangvYTloWjhwOFpNN25uMFpWSk91UXNZd1dlb0NpNHNjVHR1eVQ0bURwa3o1VkhXREtDVm1ZODljY1BXdhPscUJKYkJRb1hLT2tXMnhhdDBYmJNUmhXaGlJa0FjbIRHVVRGTedTMzVxa1JqeUtxYjkwZzB1RnBlK3g3enArMV FmUmMraTBHMEZpU28=&_gl=1*abhf0*_ga*MTY0ODc4NTczMS4xNzgxNDk1NTU1*_ga_XXTTVXWHDB*cze3ODM2NzEzODYkbzEzJGcxJHQxNzgzNjcxNTU2JGozMSRsMCRoMA..)
- Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2025. (2025). BPS. [https://web-api.bps.go.id/download.php?f=olFV5Z87QuRuDJX4QkLe7F14QWZLRThwdFludzBhL3lWT1k3dTFCaEpBTk5uR3BSUjFtMHfxSE82cUpsYlp3M3YzT3RoYUxvV0F3b2tURFo5L2NBb2R5dFJzdmxyeWRHM2cxRWRDWjVtWEIQQWltYzRRdHQRbi8zVG1jSGxDNno5SHdNbTBudURMdmZFV3RpR1RrSDZxSGNLUndNcUVaTzI4Lzh0dnpDTmJMbzMyWlNXanlGRlZPTTZBZnNFdktpd3BGY2NMdGUxNHlITUIPRXFkZrZVRRSDR FUKJNRWsxSjdPUmo5CHBrRTNpNU9KdUtUVW9YL0ZZbk3VVhya0IaXFLbUcrbGtaVWN4UVM=&\\_gl=1](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=olFV5Z87QuRuDJX4QkLe7F14QWZLRThwdFludzBhL3lWT1k3dTFCaEpBTk5uR3BSUjFtMHfxSE82cUpsYlp3M3YzT3RoYUxvV0F3b2tURFo5L2NBb2R5dFJzdmxyeWRHM2cxRWRDWjVtWEIQQWltYzRRdHQRbi8zVG1jSGxDNno5SHdNbTBudURMdmZFV3RpR1RrSDZxSGNLUndNcUVaTzI4Lzh0dnpDTmJMbzMyWlNXanlGRlZPTTZBZnNFdktpd3BGY2NMdGUxNHlITUIPRXFkZrZVRRSDR FUKJNRWsxSjdPUmo5CHBrRTNpNU9KdUtUVW9YL0ZZbk3VVhya0IaXFLbUcrbGtaVWN4UVM=&_gl=1)
- \*1ps149c\*\_ga\*MTY0ODc4NTczMS4xNzgxNDk1NTU1\*\_ga\_XXTTVXWHDB\*cze3ODM2NzEzODYkbzEzJGcxJHQxNzgzNjcxNDg1JGoyMSRsMCRoMA..
- Purba, S. F., Kusumastuti, S. Y., Pradana, R. H., & Simandjorang, B. M. V. (2024). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah. *Inovasi*, 21(1), 39–49. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v21i1.779>
- Putri, H. S., & Monika, A. K. (2022). Analisis Perubahan Struktural dan Pengaruhnya terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Barat Tahun 2011–2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 833–842. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1228>
- Rinaldi, N., Erfit, E., & Rosmeli, R. (2022). Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(3), 117–126. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i3.19>
- Romli, M. S., Hutagaol, M. P., & Priyarsono. (2016). *Transformasi Struktural: Faktor-Faktor Dan Pengaruhnya Terhadap Disparitas Pendapatan Di Madura*. 5(1), 25–44.
- Sarfiah, S. N., Septiani, Y., & Sugiharti, Rr. R. (2023). Peran kendal sebagai kawasan ekonomi khusus dalam transformasi ekonomi: Analisis strategis dan implementasi melalui matriks SWOT. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 3(1), 47–65. <https://doi.org/10.53088/jerps.v3i1.601>
- Setiyadi, R. I., & Santosa, P. B. (2013). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Rokok Di Kabupaten Kudus Tahun 1993-2010*. 2(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA. <https://online.fliphtml5.com/cyqfr/jppo/#p=2>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan

provinsi-provinsi di pulau Jawa. s1.art9  
*Jurnal Kebijakan Ekonomi dan*  
*Keuangan,* 92–100.  
<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.is>